

**SINERGI KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYEDIAAN AIR BERSIH DI DESA UMAKLARAN KECAMATAN TASIFETO TIMUR
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Yohana Irminda Dola

NPP. 32.0679

Asdaf Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: 32.0679@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Hari Nur Cahya Murni, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement: This research is motivated by the issue of unequal access to clean water in Umaklaran Village, Tasifeto Timur District, Belu Regency. Although both the central and local governments have encouraged the development of basic infrastructure, the synergy between the Village Head and the Village Consultative Body (BPD) in responding to clean water needs has not been optimal. This is evident from the absence of village regulations on water, limited infrastructure, as well as geographic and climatic challenges such as prolonged dry seasons. In fact, the provision of clean water is crucial for improving the quality of life, especially in rural areas. **Purpose:** The purpose of this research is to examine and analyze the form of synergy between the Village Head and the BPD in the provision of clean water in Umaklaran Village and to identify the factors that hinder the realization of such synergy. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The study involved 11 informants consisting of the Village Head, village officials, BPD members, the sub-district head, the director of the regional water utility (Perumda Air Minum), and community members who use water facilities. The study employs the synergy theory proposed by Sahban (2018), which includes four dimensions: results-oriented and positive, diverse perspectives that complement paradigms, cooperation with shared goals and agreements, and an effective and continuous process. **Result:** The findings show that the synergy between the Village Head and the BPD in clean water provision in Umaklaran Village is relatively good, especially in terms of communication and cooperation. However, the synergy has not yet reached an optimal level due to the lack of village-level regulations, limited coordination with local government, and inadequate water infrastructure in several hamlets. Therefore, strengthening synergy through the formulation of village regulations, regular program evaluations, and enhanced cross-sector collaboration is needed to ensure the community's clean water needs are fully met. **Conclusion:** The existing synergy between the Village Head and the BPD holds great potential in addressing the challenges of clean water provision in Umaklaran Village. However, to achieve more optimal results, it is necessary to strengthen village-level regulations, implement continuous program evaluations, and improve collaboration between village and regional governments so that the clean water needs of the community can be met comprehensively and sustainably.

Keywords: Synergy, Village Head, Village Consultative Body, Clean Water, Village Governance, Umaklaran.

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ketersediaan air bersih yang belum merata di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu. Meskipun pemerintah pusat dan daerah telah mendorong pembangunan infrastruktur dasar, namun sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merespons kebutuhan air bersih masih belum optimal. Hal ini terlihat dari belum adanya peraturan desa tentang air, keterbatasan infrastruktur, serta tantangan geografis dan iklim yang kering. Padahal, pemenuhan air bersih sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat terwujudnya sinergi tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, anggota BPD, camat, direktur Perumda Air Minum, dan masyarakat pengguna prasarana air bersih. Penelitian ini menggunakan teori bersinergi menurut Sahban (2018), yang mencakup empat dimensi: berorientasi pada hasil dan positif, perspektif beragam yang saling melengkapi, kerja sama dengan tujuan yang sama dan kesepakatan, serta proses yang efektif dan berkelanjutan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran sudah cukup baik, terutama dalam aspek komunikasi dan kerja sama. Namun demikian, sinergi belum sepenuhnya optimal karena masih terkendala oleh kurangnya regulasi desa, keterbatasan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta minimnya sarana prasarana air bersih di beberapa dusun. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi melalui penyusunan regulasi desa, evaluasi program secara berkala, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh.

Kesimpulan: Sinergi yang terbangun antara Kepala Desa dan BPD memiliki potensi besar dalam menjawab tantangan penyediaan air bersih di Desa Umaklaran. Namun untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, dibutuhkan penguatan regulasi di tingkat desa, evaluasi program secara berkelanjutan, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah agar kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Sinergi, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Air Bersih, Pemerintahan Desa, Umaklaran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, persoalan akses air bersih masih menjadi tantangan besar, khususnya di wilayah perdesaan. Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tahun 2022, hanya 83% rumah tangga Indonesia yang memiliki akses terhadap air minum yang aman, dan Indonesia berada pada peringkat ke-140 dari 193 negara dalam indeks kualitas air minum global. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan air bersih belum sepenuhnya teratasi, terutama di wilayah dengan tantangan geografis dan infrastruktur terbatas seperti Nusa Tenggara Timur (NTT).

Provinsi NTT mencatat bahwa hanya 88,35% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (BPS, 2023). Hal ini diperparah dengan iklim tropis kering yang menyebabkan musim kemarau panjang hingga delapan bulan setiap tahunnya. Salah satu daerah yang mengalami dampak serius dari kondisi ini adalah Desa Umaklaran di Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kabupaten Belu sendiri tergolong sebagai wilayah perbatasan yang menjadi prioritas pembangunan nasional, namun kenyataannya masih menghadapi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih.

Berdasarkan data BPS dan Pemerintah Desa Umaklaran (2024), hanya sebagian kecil rumah tangga di Kabupaten Belu yang menggunakan air leding (9,62%) sebagai sumber utama air minum. Sebagian besar penduduk masih mengandalkan sumber air tradisional seperti sumur gali dan mata air terlindung, bahkan ada yang masih bergantung pada air sungai dan sumur tak terlindung. Di Desa Umaklaran sendiri, dari 540 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di enam dusun, belum semuanya mendapatkan akses air bersih yang layak dan konsisten. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa sebagian besar dusun hanya memiliki satu atau dua sumber air seperti sumur gali, sungai, atau instalasi pengolahan air yang belum merata dan tidak dapat mencukupi kebutuhan seluruh penduduk, terutama saat musim kemarau tiba.

Desa Umaklaran memiliki potensi sumber air yang sebenarnya bisa dioptimalkan, seperti sumber air Weutu dan Taekto'o. Namun, hingga saat ini belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang secara khusus mengatur pengelolaan dan distribusi air bersih. Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Dusun Weutu hanya melayani sebagian kecil masyarakat karena prioritas distribusinya ditujukan ke wilayah perkotaan. Sementara sumur bor dan embung yang ada di dusun lain sering mengalami penyusutan air saat musim kering. Hal ini mengakibatkan masyarakat harus membeli air tangki secara mandiri, padahal mayoritas penduduk Desa Umaklaran masih berada dalam kategori belum sejahtera secara ekonomi.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa selain kendala teknis dan geografis, terdapat pula tantangan kelembagaan, yaitu belum optimalnya sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan program penyediaan air bersih. Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa dan BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tanggung jawab bersama dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Umaklaran memiliki visi untuk menjadi desa yang berkualitas, mandiri, dan maju. Namun, visi ini sulit tercapai jika kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih belum terpenuhi. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Umaklaran (2024), belum adanya regulasi serta koordinasi yang kuat antara Kepala Desa dan BPD menjadi salah satu kendala utama dalam

pengelolaan sumber daya air. Dalam konteks ini, sinergi kelembagaan menjadi hal yang sangat penting, mengingat air bukan hanya kebutuhan vital, tetapi juga menjadi penggerak utama bagi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Umaklaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran, serta faktor-faktor yang menghambat keberhasilan kerja sama tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Peneliti berfokus pada permasalahan keterbatasan akses dan distribusi air bersih di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi. Meskipun air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, ketersediaannya masih bergantung pada sumber alami seperti sumur gali, mata air, dan air sungai yang tidak selalu layak dikonsumsi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat dengan pelayanan dasar yang disediakan oleh pemerintah desa. Di sisi lain, berdasarkan UU Desa No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 3 Tahun 2024, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tanggung jawab bersama dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, termasuk penyediaan air bersih yang layak.

Namun demikian, sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan air bersih masih belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketiadaan regulasi formal seperti Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur khusus tentang pengelolaan dan distribusi air. Hal ini berdampak pada lemahnya koordinasi kelembagaan, serta rendahnya daya dorong kebijakan untuk menjangkau seluruh masyarakat secara merata, terutama pada dusun yang letaknya jauh dari sumber air utama. Dalam praktiknya, pelayanan air bersih kerap bersifat sektoral, tidak terintegrasi dalam satu sistem kelembagaan yang kuat, serta minim partisipasi masyarakat.

Masalah ini juga diperkuat dengan kondisi geografis Desa Umaklaran yang kering dan berbukit, menyebabkan tantangan tambahan dalam pembangunan infrastruktur air bersih. Walaupun terdapat potensi sumber air seperti Weutu dan Taekto'o, pemanfaatannya belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan lemahnya pengelolaan teknis. Di sisi lain, masyarakat di beberapa dusun bahkan masih harus membeli air tangki dari luar dengan harga tinggi, menunjukkan ketimpangan layanan yang nyata. Padahal dalam konteks pembangunan desa berkelanjutan, air bersih menjadi syarat utama bagi peningkatan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat desa.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran normatif dari Kepala Desa dan BPD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa dengan implementasi riil di lapangan dalam penyediaan air bersih. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas tentang pengelolaan air bersih dari sisi teknis atau partisipasi masyarakat, namun belum banyak yang mengkaji secara spesifik bentuk sinergi kelembagaan antara Kepala Desa dan BPD dalam konteks perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pelayanan air bersih. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi celah tersebut, dengan menelaah secara mendalam dinamika sinergi yang terjadi di Desa Umaklaran dan faktor-faktor penghambat maupun pendukung keberhasilannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai studi sebelumnya yang berkaitan dengan tata kelola air bersih, pemberdayaan masyarakat, serta tata kelola kelembagaan di tingkat lokal. Salah satunya adalah penelitian oleh Williams et al. (2023) dalam *Water (Switzerland)* yang meneliti tentang kerentanan air tanah dan risiko akses air bersih di wilayah kering. Penelitian ini menekankan pentingnya pemerataan akses terhadap air bersih sebagai bagian dari keadilan lingkungan. Temuan tersebut sejalan dengan

kondisi geografis Desa Umaklaran yang berada di wilayah kering dan menghadapi tantangan dalam ketersediaan air bersih yang merata.

Cervantes et al. (2017) dalam *Tecnología y Ciencias del Agua* membahas peran pemerintah lokal dalam pengelolaan air bersih di wilayah Ciénega de Chapala, Meksiko. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga lokal dalam menjamin layanan air minum yang efektif. Hal ini relevan dengan konteks penelitian di Desa Umaklaran, di mana sinergi antara Kepala Desa dan BPD menjadi kunci dalam penyediaan air bersih.

Mizrahi et al. (2020) dalam *Policy and Politics* meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial pemerintah, kepuasan warga, dan kepercayaan publik. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dan kehadiran pemerintah lokal yang akuntabel, yang juga menjadi inti dari studi ini.

Sementara itu, Simangunsong et al. (2020) melalui penelitiannya di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa pembangunan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh penguatan manajemen dan pengelolaan kelembagaan lokal. Penelitian ini menjadi rujukan dalam melihat bagaimana pemerintahan desa seharusnya membangun struktur manajemen pelayanan publik yang efektif, termasuk dalam penyediaan air bersih.

Penelitian lain oleh Simangunsong, Hutasoit, dan Sentosa (2019) mengangkat kerangka strategis tentang sinergi tata kelola, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat dalam sektor publik Indonesia. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa sinergi antar aktor lokal dalam pembangunan menjadi faktor krusial dalam menciptakan pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan.

Labolo dan Rochmansjah (2020) melalui pendekatan panel data mengkaji hubungan antara perdagangan, investasi asing, dan keberlanjutan lingkungan di kawasan ASEAN. Meskipun cakupannya bersifat makro, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak dikelola dengan prinsip tata kelola berkelanjutan dapat merusak akses terhadap sumber daya seperti air bersih. Hal ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam konteks kebijakan di desa perbatasan seperti Umaklaran.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan sejumlah penelitian sebelumnya yang telah mengkaji isu serupa, baik dari aspek tata kelola pemerintahan desa, akses air bersih, maupun sinergi kelembagaan. Penelitian oleh Williams et al. (2023) lebih menekankan pada aspek kerentanan air tanah dan pemerataan akses air bersih di kawasan kering dalam perspektif lingkungan global, namun tidak secara spesifik mengulas sinergi kelembagaan lokal di tingkat desa. Demikian pula, penelitian Cervantes et al. (2017) membahas pengelolaan air bersih oleh pemerintah lokal, namun kajiannya berlokasi di Meksiko dan tidak menyoroti dinamika hubungan antar perangkat desa seperti Kepala Desa dan BPD. Sementara Mizrahi et al. (2020) menitikberatkan pada pengaruh tanggung jawab sosial pemerintah terhadap kepuasan dan kepercayaan masyarakat, yang meskipun relevan, tidak secara spesifik menyentuh persoalan akses air bersih dan sinergi kelembagaan dalam konteks desa perbatasan.

Penelitian Simangunsong et al. (2020) dan Simangunsong et al. (2019) memang membahas tata kelola publik, pembangunan daerah, dan pemberdayaan masyarakat, namun lebih fokus pada kerangka makro manajemen kelembagaan dan strategi pembangunan, tanpa mendalami aspek kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD dalam menangani persoalan layanan dasar seperti air bersih.

Begitu juga dengan Labolo dan Rochmansjah (2020) yang menyoroti keberlanjutan lingkungan dalam konteks globalisasi ekonomi dan kebijakan tingkat ASEAN, tanpa mengaitkan secara langsung dengan praktik tata kelola dan pelayanan air bersih di tingkat desa. Dengan demikian, kebaruan dalam penelitian ini terletak pada fokus spesifik terhadap dinamika sinergi antara Kepala

Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran, wilayah yang berada di daerah perbatasan dengan tantangan geografis dan infrastruktur. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap pemahaman bagaimana lembaga desa dapat bersinergi secara nyata dalam merumuskan kebijakan, merancang program, dan mengatasi hambatan dalam penyediaan air bersih, termasuk keterlibatan masyarakat dan hambatan koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian lokal yang belum banyak mengeksplorasi peran kolaboratif Kepala Desa dan BPD dalam konteks pelayanan dasar berbasis desa, serta menghadirkan pendekatan berbasis studi kasus langsung pada desa perbatasan, yang selama ini jarang dijadikan objek kajian dalam literatur akademik terkait tata kelola air bersih di Indonesia.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam membangun sinergi tersebut serta mengevaluasi sejauh mana kolaborasi kedua lembaga desa ini mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya akses terhadap air bersih yang layak dan berkelanjutan.

II. METODE

Secara umum terdapat tiga jenis pendekatan yang diterapkan pada metodologi penelitian yakni terdiri dari, penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, serta penelitian gabungan kuantitatif dan kualitatif (Simangunsong, 2016: 177). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode penelitian kualitatif dapat dikatakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), dapat dikatakan juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini sering digunakan pada penelitian bidang antropologi budaya (Siyoto dan Sodik, 2015). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Sugiyono, 2013). Metode pengumpulan data secara triangulasi, yaitu melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu.

Peneliti mewawancarai secara mendalam 11 orang informan, yang terdiri dari Kepala Desa Umaklaran, Kepala Seksi Pelayanan Desa Umaklaran, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Umaklaran, ketua dan anggota BPD Desa Umaklaran, Camat Tasifeto Timur, Direktur Perumda Air Minum Kabupaten Belu, serta empat warga yang merupakan pengguna langsung fasilitas air bersih. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan penyediaan air bersih di desa tersebut.

Analisis data dilakukan dengan merujuk pada teori sinergi menurut Sahban (2018), yang terdiri dari empat dimensi utama: berorientasi pada hasil dan positif, perspektif beragam yang saling melengkapi, kerja sama dengan tujuan dan kesepakatan bersama, serta proses sinergi yang efektif dan berkelanjutan. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menggambarkan bentuk sinergi serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fokus utama pembahasan diarahkan pada bagaimana bentuk sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran, serta kendala-kendala yang menghambatnya. Analisis didasarkan pada empat dimensi Ber-sinergi menurut teori Sahban, yaitu:

1. Berorientasi pada hasil dan sikap positif,
2. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma,
3. Saling bekerja sama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan, dan
4. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses.

3.1 Sinergi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran

3.1.1 Berorientasi pada Hasil dan Sikap Positif

Dimensi ini menunjukkan bahwa sinergi antara Kepala Desa dan BPD dalam penyediaan air bersih diarahkan untuk mencapai hasil nyata, yaitu tersedianya akses air bersih bagi seluruh masyarakat. Kolaborasi yang terjalin memiliki tujuan jelas dan positif, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Umaklaran masih mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama pada musim kemarau. Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya, seperti membangun sumur bertenaga surya dan bekerja sama dengan Perumda Air Minum. Namun, permasalahan teknis dan kondisi geografis menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Pentingnya orientasi hasil ditunjukkan melalui tindakan nyata, seperti program pembagian viber (wadah air) dan sambungan rumah (SR) bagi warga berpenghasilan rendah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih perlu ditingkatkan melalui pemeliharaan dan peningkatan partisipasi masyarakat.

3.1.2 Perspektif Beragam Mengganti atau Melengkapi Paradigma

Sinergi juga terbangun melalui keterbukaan terhadap perspektif yang beragam. Kepala Desa dan BPD memiliki peran dan sudut pandang yang berbeda, tetapi perbedaan ini menjadi kekuatan dalam menyusun strategi bersama. Kepala Desa lebih memahami sisi kebijakan dan teknis pemerintahan, sedangkan BPD membawa aspirasi langsung dari masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, diskusi antara pemerintah desa dan BPD dilakukan secara rutin, baik melalui musrenbangdes maupun secara informal. Meskipun belum banyak melakukan studi banding ke desa lain, proses penggalan informasi dan masukan dari masyarakat sudah berjalan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan referensi dari luar desa menyebabkan inovasi belum berkembang maksimal. Oleh karena itu, kerja sama dengan pihak eksternal seperti LSM atau lembaga teknis lain perlu dipertimbangkan untuk melengkapi pendekatan yang sudah ada.

3.1.3 Saling Bekerja Sama dan Bertujuan Sama serta Adanya Kesepakatan

Dimensi ini menggambarkan bahwa sinergi berjalan dengan efektif jika kedua pihak memiliki visi yang sama dan saling mendukung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Dalam konteks Desa Umaklaran, kerja sama ini sudah tampak melalui diskusi kebijakan dan pembagian peran yang cukup baik antara Kepala Desa dan BPD. Namun, berdasarkan wawancara, belum ada Peraturan Desa (Perdes) khusus terkait air bersih. Kebijakan yang ada lebih bersifat informal dan mengandalkan kearifan lokal, seperti menanam pohon di dekat sumber air. Hal ini menjadi hambatan dalam mewujudkan program yang berkelanjutan, karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan peningkatan kebutuhan akan air bersih. Tanpa adanya kesepakatan formal berupa regulasi, maka rencana yang telah disusun berpotensi tidak dapat mencakup seluruh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

3.1.4 Sangat Efektif Diusahakan dan Merupakan Suatu Proses

Sinergi antara Kepala Desa dan BPD bukanlah sesuatu yang instan, melainkan sebuah proses yang memerlukan usaha terus-menerus, komitmen, dan evaluasi. Pemerintah desa telah melakukan rapat evaluasi berkala yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat. Meskipun evaluasi telah dilakukan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi kendala. Misalnya, program iuran untuk pemeliharaan sumber air tidak berjalan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa fasilitas mengalami kerusakan karena perilaku tidak bertanggung jawab, seperti membakar sampah di sekitar pipa atau memotong saluran air. Ini menunjukkan bahwa sinergi yang berkelanjutan membutuhkan dukungan dari masyarakat sebagai penerima manfaat. Perlu strategi baru dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga fasilitas air bersih yang telah disediakan.

3.2 Faktor-faktor yang menghambat sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di Desa Umaklaran

Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan penting, salah satu penghambat utama adalah belum adanya Peraturan Desa (Perdes) khusus tentang air bersih. Ketiadaan regulasi formal ini membuat kebijakan hanya mengandalkan aturan adat atau kearifan lokal. Di samping itu, kendala alam berupa musim kemarau panjang sangat mempengaruhi ketersediaan air, sedangkan infrastruktur seperti sumur bertenaga surya sering mengalami kerusakan teknis. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga kurang efektif, karena usulan dari desa sering tidak segera direspons. Hambatan lain datang dari masyarakat sendiri, terutama rendahnya kesadaran untuk menjaga fasilitas air dan enggan membayar iuran pemeliharaan. Evaluasi rutin memang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tetapi hasilnya belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Pemerintah Desa Umaklaran.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran telah terjalin cukup baik melalui komunikasi yang rutin, pembagian peran yang seimbang, dan kesadaran kolektif terhadap pentingnya akses air bersih bagi masyarakat. Namun, sinergi tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, di antaranya ketiadaan regulasi formal (Perdes), keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas air yang telah tersedia.

Sama halnya dengan temuan Suryani dan Sari (2021) dalam *Jurnal Publicuho*, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada efektivitas komunikasi dan kolaborasi antara Kepala Desa dan BPD. Di Umaklaran, hal ini tercermin dari kegiatan musyawarah desa dan pembagian tanggung jawab yang dilakukan secara informal namun konsisten.

Berbeda dengan temuan Purbawati (2021) dalam *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, yang menunjukkan bahwa pelibatan BPD dalam pengawasan layanan publik di desa masih lemah, penelitian ini justru menunjukkan bahwa BPD di Desa Umaklaran cukup aktif dalam menyuarakan aspirasi warga dan ikut serta dalam pengawasan program penyediaan air. Namun demikian, keterlibatan tersebut belum didukung dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dan dukungan anggaran yang memadai.

Temuan ini menolak sebagian kesimpulan dari Labolo dan Rochmansjah (2020) yang berfokus pada dampak makro dari globalisasi terhadap kelestarian lingkungan. Penelitian ini justru menunjukkan bahwa di tingkat desa, tantangan utama bukan pada tekanan globalisasi, melainkan lemahnya sistem kelembagaan lokal dan keterbatasan akses sumber daya yang memadai.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Simangunsong et al. (2019) yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan lokal, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat sebagai tiga pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan. Di Umaklaran, sinergi antara Kepala Desa dan BPD menunjukkan kemajuan, tetapi ketidakterlibatan aktif masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Selaras dengan temuan Mizrahi et al. (2020), keberhasilan layanan publik sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Dalam konteks Umaklaran, meskipun secara kelembagaan sinergi telah dibangun, kurangnya komunikasi vertikal dengan pemerintah daerah dan lambatnya respons terhadap kebutuhan infrastruktur air menjadi penyebab munculnya ketidakpuasan sebagian warga.

Sama halnya dengan Cervantes et al. (2017) di Meksiko, penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran pemerintah lokal dalam menjamin akses air bersih membutuhkan kolaborasi antarlembaga dan keterlibatan warga. Namun, konteks Indonesia, khususnya di desa perbatasan seperti Umaklaran, menunjukkan bahwa kelembagaan formal belum sepenuhnya ditopang oleh peraturan dan pengawasan yang kuat.

Temuan ini juga sejalan dengan Williams et al. (2023) yang menekankan bahwa ketimpangan akses air bersih di wilayah kering sangat dipengaruhi oleh kerentanan ekosistem dan lemahnya strategi pemerataan. Desa Umaklaran mengalami hal serupa, di mana beberapa dusun menikmati fasilitas air, sementara dusun lainnya masih harus membeli air dari luar desa. Dengan demikian, temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap kajian sinergi kelembagaan desa dalam pelayanan publik, khususnya air bersih. Penelitian ini tidak hanya memperkuat teori-teori terdahulu, tetapi juga memberikan bukti empiris baru tentang bagaimana sinergi Kepala Desa dan BPD dijalankan dalam konteks desa perbatasan yang minim dukungan regulasi dan terbatas sumber daya.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah penggunaan kearifan lokal sebagai alternatif regulasi formal dalam pengelolaan sumber daya air. Di Desa Umaklaran, pemerintah desa dan BPD belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) khusus mengenai penyediaan air bersih. Namun, sebagai langkah adaptif, mereka memanfaatkan pendekatan budaya lokal, seperti mendorong masyarakat untuk menanam pohon di sekitar sumber air guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan air bersih. Penggunaan kearifan lokal ini menunjukkan bahwa di tengah keterbatasan kebijakan formal, desa tetap mampu merumuskan solusi berbasis nilai-nilai lokal yang relevan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakatnya. Hal ini mencerminkan bentuk inovasi sosial yang berakar pada pemahaman kontekstual dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Temuan ini belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu, sehingga dapat menjadi referensi atau model alternatif bagi desa-desa lain yang menghadapi kendala serupa, terutama dalam hal regulasi dan sumber daya. Pendekatan berbasis kearifan lokal terbukti tidak hanya memperkuat partisipasi masyarakat, tetapi juga mampu menciptakan rasa tanggung jawab kolektif terhadap kelestarian lingkungan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa sinergi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyediaan air bersih di Desa Umaklaran telah terjalin cukup baik melalui komunikasi dan kerja sama yang aktif. Meskipun belum didukung oleh regulasi formal, upaya penyediaan air telah dilakukan berbasis kearifan lokal dan aspirasi masyarakat. Temuan ini memperluas pemahaman tentang pentingnya sinergi kelembagaan dan partisipasi lokal dalam pelayanan dasar di desa.

Guna memperkuat sinergi tersebut, disarankan agar Pemerintah Desa dan BPD segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan air bersih, meningkatkan kolaborasi dengan

pihak eksternal, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pemanfaatan pendekatan sosial-budaya. Dengan demikian, program air bersih dapat berjalan lebih merata, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu dan biaya, serta dilakukan hanya di satu lokasi yaitu Desa Umaklaran, sehingga belum mewakili kondisi desa lain. Selain itu, penelitian dilaksanakan pada musim penghujan (bulan Januari), sehingga belum mampu merepresentasikan tantangan ketersediaan air bersih saat musim kemarau. Untuk itu, disarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan pada musim kemarau, serta memperluas cakupan kajian mencakup aspek ekonomi (biaya dan kemampuan bayar), serta perspektif gender dan kelompok rentan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari bahwa temuan dalam penelitian ini masih bersifat awal, sehingga disarankan dilakukan penelitian lanjutan di desa-desa lain dengan karakteristik serupa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sinergi kelembagaan dalam penyediaan air bersih, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan di berbagai konteks lokal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Umaklaran beserta jajaran perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang telah memberikan kesempatan serta dukungan selama pelaksanaan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Nusa Tenggara Timur Dalam Angka 2023*. BPS Provinsi NTT.
- Cervantes, A., Velázquez, M., & Pimentel, J. L. (2017). Government and local administration of drinking water in the Ciénega de Chapala, Michoacán, Mexico. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 8(1), 65–80.
- Labolo, M., & Rochmansjah, H. (2020). Do trade, FDI and globalization hurt environmental sustainability in ASEAN national governance, industrialisation and environmental sustainability in a globalized business environment: A panel data analysis of trade-off. *Journal of Security and Sustainability Issues*, 10(October), 81–92.
- Mizrahi, S., Cohen, N., & Vigoda-Gadot, E. (2020). Government's social responsibility, citizen satisfaction and trust. *Policy and Politics*, 48(3), 431–451.
<https://doi.org/10.1332/030557320X15768424423432>
- Purbawati, H. (2021). Peran BPD dalam pengawasan layanan publik desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 9(1), 44–56.
- Purwanto, E. A. (2021). Efektivitas regulasi desa dalam pengelolaan air bersih. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 8(2), 87–98.
- Sahban, M. A. (2018). *Kolaborasi pembangunan ekonomi di negara berkembang*. CV SAH MEDIA.
- Simanungsong, F. (2016). *Metodologi penelitian pemerintah*. Alfabet.
- Simangunsong, F., Hutasoit, I., & Sentosa, I. (2019). A strategic framework of good governance, infrastructure development and community empowerment in Indonesian public sector management. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 2019(Special Issue), 1–12.

- Simangunsong, F., Lamawato, S. P., & Hutasoit, I. (2020). Management development of district in the administration of local government in East Flores Regency, East Nusa Tenggara Province. *Journal of Urban and Regional Analysis*, 12(2), 145–163.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryani, A., & Sari, I. (2021). Sinergi pemerintah desa dan BPD dalam pembangunan desa. *Jurnal Publicuho*, 9(2), 234–246.
- Suwana, F., & Lily, A. (2017). Empowering Indonesian women through building digital media literacy. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 38(3), 212–217.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Williams, S. A., Megdal, S. B., Zuniga-Teran, A. A., Quanrud, D. M., & Christopherson, G. (2023). Equity assessment of groundwater vulnerability and risk in drinking water supplies in arid regions. *Water (Switzerland)*, 16(23), 3520. <https://doi.org/10.3390/w16233520>

